

Koneksi Politik, Komisaris Independen, dan Integritas Laporan Keuangan: Peran Moderasi Gender Diversity

Masyitoh Fitriyah^{a*}, Eka Hariyani^a

^aJurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia

*Email : masyithoftria@gmail.com

Abstract

Research aims:

This study examines the effect of political connections and independent commissioners on financial reporting integrity, with gender diversity as a moderating variable in consumer non-cyclical firms listed on the Indonesia Stock Exchange (2021–2024).

Design/Methodology/Approach:

A quantitative approach using panel data regression was applied. The sample was selected through purposive sampling. Variables were measured using corporate governance indicators, with firm size as a control variable.

Research findings:

Political connections do not significantly affect financial reporting integrity, while independent commissioners have a significant negative effect. Gender diversity strengthens governance by moderating both relationships.

Theoretical contribution/Originality:

This study extends agency theory and gender socialization theory by highlighting the role of gender diversity in enhancing governance effectiveness.

Practitioner/Policy implication:

Firms should strengthen board independence and promote gender diversity to improve financial reporting quality.

Research limitation/Implication:

The study is limited to one sector and period, which may affect generalizability.

Keywords:

Political Connections; Independent Commissioners; Gender Diversity; Financial Reporting Integrity

Classification Paper :
Research Paper

History
Submitted:
2026-03-01

Revised:
2026-04-13

Accepted:
2026-04-16

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan sarana utama dalam menyampaikan informasi ekonomi perusahaan kepada pihak eksternal, seperti investor, kreditor, dan regulator (Kieso et al., 2020). Kualitas informasi yang disajikan menjadi krusial karena digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, integritas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana informasi disajikan secara jujur, andal, dan bebas dari bias. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa integritas laporan keuangan masih menjadi isu yang berulang. Kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan di Indonesia, seperti yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Indofarma Tbk, mengindikasikan bahwa laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Fenomena ini menunjukkan

bahwa mekanisme pengawasan dan tata kelola perusahaan belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif teori keagenan, konflik kepentingan antara principal dan agent akibat asimetri informasi mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini menegaskan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan dalam menjaga integritas pelaporan. Dua mekanisme yang sering menjadi perhatian adalah koneksi politik dan keberadaan komisaris independen. Koneksi politik dapat memberikan akses terhadap sumber daya dan perlindungan regulasi, namun juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Sementara itu, komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kualitas monitoring, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Saraswati et al. (2024) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan Setiadi dan Dewi (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan. Demikian pula, temuan terkait komisaris independen menunjukkan variasi hasil, mulai dari berpengaruh positif (Sucitra et al., 2020; Novianti & Isynuwardhana, 2021), negatif (Wijaya, 2022), hingga tidak signifikan (Yudiawan et al., 2020; Dewi et al., 2022). Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara mekanisme tata kelola dan integritas laporan keuangan belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif.

Selain itu, kajian mengenai gender diversity sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola masih menunjukkan hasil yang beragam. Suhendra (2020) menemukan bahwa gender diversity berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan Tarigan dan Tjandrakirana (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian yang menguji gender diversity sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara koneksi politik, komisaris independen, dan integritas laporan keuangan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya dalam memahami peran karakteristik dewan dalam memperkuat mekanisme tata kelola.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua celah penelitian utama. Pertama, inkonsistensi temuan empiris terkait pengaruh koneksi politik dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat kontingen. Kedua, keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan gender diversity sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa peran karakteristik dewan dalam memperkuat tata kelola belum banyak dieksplorasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan serta menganalisis peran gender diversity sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tata kelola perusahaan, khususnya dalam menjelaskan interaksi antar mekanisme pengawasan dalam meningkatkan integritas pelaporan keuangan.

Literatur REview dan Pengembangan Hipotesis

Landasan Teori

Teori keagenan yang diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menciptakan konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Dalam kondisi ini, manajemen memiliki kecenderungan untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga berpotensi menurunkan integritas informasi yang disajikan (Jensen & Meckling, 1976; Setiadi & Dewi, 2023). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme tata kelola menjadi penting untuk membatasi perilaku oportunistik tersebut dan memastikan kualitas pelaporan keuangan.

Sejalan dengan itu, teori pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholder. Dalam konteks ini, integritas laporan keuangan berfungsi sebagai sarana utama untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi organisasi. Informasi yang transparan dan andal memungkinkan stakeholder mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif serta mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Freeman, 1984).

Dalam perspektif tata kelola, koneksi politik merupakan faktor yang memiliki implikasi ambivalen terhadap integritas laporan keuangan. Di satu sisi, koneksi politik dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber daya dan perlindungan regulasi. Namun di sisi lain, koneksi tersebut berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan karena adanya perlindungan tertentu yang mengurangi tekanan eksternal. Temuan empiris menunjukkan hasil yang beragam, di mana Saraswati et al. (2024) menemukan pengaruh signifikan, sedangkan Setiadi dan Dewi (2023) tidak menemukan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme utama dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara konseptual, komisaris independen diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui fungsi monitoring yang objektif. Namun, bukti empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif (Sucitra et al., 2020; Novianti & Isynuwardhana, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan (Wijaya, 2022; Yudiawan et al., 2020; Dewi et al., 2022). Variasi ini mengindikasikan bahwa independensi formal belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan secara substantif.

Dari perspektif perilaku, teori sosialisasi gender yang dikemukakan oleh Alice H. Eagly menjelaskan bahwa perempuan cenderung memiliki sensitivitas etis yang lebih tinggi, lebih berhati-hati, dan lebih menghindari risiko dalam pengambilan keputusan. Karakteristik ini berpotensi meningkatkan kualitas pengawasan dalam dewan dan mendorong praktik pelaporan keuangan yang lebih konservatif (Eagly, 1987; Croson & Gneezy, 2009).

Namun demikian, bukti empiris terkait peran gender diversity juga menunjukkan hasil yang beragam. Suhendra (2020) menemukan bahwa gender diversity berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan Tarigan dan Tjandrakirana (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan. Selain itu, penelitian yang menempatkan gender

diversity sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara mekanisme tata kelola dan integritas laporan keuangan masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa hubungan antara koneksi politik, komisaris independen, dan integritas laporan keuangan belum menghasilkan temuan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola bersifat kontingen dan dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan, termasuk komposisi gender dalam dewan. Oleh karena itu, pengujian gender diversity sebagai variabel moderasi menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mekanisme tata kelola bekerja dalam meningkatkan integritas laporan keuangan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Integritas Laporan Keuangan

Koneksi politik mencerminkan adanya kedekatan antara perusahaan dengan aktor pemerintah yang dapat memengaruhi intensitas pengawasan eksternal. Dalam kondisi tertentu, koneksi ini memungkinkan perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan regulasi atau akses sumber daya, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan terhadap transparansi pelaporan. Ketika mekanisme pengawasan eksternal melemah, manajemen memiliki insentif yang lebih besar untuk menyajikan informasi keuangan secara oportunistik.

Namun demikian, koneksi politik juga tidak selalu berdampak negatif secara langsung. Dalam beberapa kasus, keberadaan hubungan politik justru dapat meningkatkan stabilitas perusahaan dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menyebabkan hubungan antara koneksi politik dan integritas laporan keuangan menjadi tidak pasti dan bergantung pada konteks tata kelola perusahaan (Saraswati et al., 2024; Setiadi & Dewi, 2023). Berdasarkan argumen tersebut, koneksi politik diperkirakan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H₁ : Koneksi politik berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa dalam perusahaan terjadi pemisahan peran antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajemen) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi, di mana *agent* memiliki lebih banyak akses dan kendali atas informasi dibandingkan *principal*. Dalam kondisi ini, manajemen memiliki kecenderungan untuk menyajikan informasi keuangan yang bias atau dimanipulasi demi mempertahankan citra dan kepentingan pribadi, yang dapat menurunkan integritas laporan keuangan.

Untuk mengurangi konflik kepentingan, dibutuhkan pengawasan yang efektif, salah satunya melalui komisaris independen. Sebagai pihak luar yang bebas dari kepentingan internal, komisaris independen diharapkan dapat mengawasi manajemen secara objektif

dan menjaga integritas laporan keuangan. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana peran tersebut dijalankan secara aktif, bukan sekadar formalitas. Jika berfungsi dengan baik, maka potensi manipulasi informasi bisa ditekan dan integritas laporan keuangan meningkat (Sucitra et al., 2020; Wijaya, 2022).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Sucitra et al., (2020),Wijaya (2022), dan Fatin dan Suzan (2022) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan maka ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitiannya adalah:

H₂ : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Peran Moderasi Gender Diversity pada Hubungan Koneksi Politik dan Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh Freeman (1984), perusahaan dipandang memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh aktivitas perusahaan, seperti pemerintah, masyarakat, karyawan, investor, dan regulator. Dalam kerangka ini, penyajian laporan keuangan yang berintegritas tinggi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam memenuhi hak informasi para *stakeholder*. Laporan keuangan yang andal menjadi sarana utama untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya.

Namun dalam praktiknya, keberadaan koneksi politik, yaitu hubungan antara manajemen perusahaan dengan pejabat atau institusi pemerintah, sering dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tertentu seperti kemudahan regulasi, pengurangan beban pajak, atau lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan integritas laporan keuangan karena perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung merasa terlindungi dari sanksi atau pengawasan ketat, sehingga lebih leluasa melakukan praktik oportunistik, termasuk manipulasi pelaporan keuangan (Saraswati *et al.*, 2024). Dalam perspektif *stakeholder theory*, perilaku ini berpotensi merugikan *stakeholder* lain, khususnya investor dan publik, karena informasi keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan (Setiadi & Dewi, 2023).

Oleh karena itu, *gender diversity* relevan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara koneksi politik dan integritas laporan keuangan. *Gender diversity* dalam dewan mencerminkan perbedaan karakter dan pola pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan *Gender Socialization Theory*, laki-laki cenderung lebih berorientasi pada pencapaian hasil dan pengambilan risiko, sedangkan perempuan umumnya lebih berhati-hati, patuh terhadap aturan, serta memiliki sensitivitas etis yang lebih tinggi (Eagly, 1987; Eagly & Wood, 2012). Perbedaan tersebut menjadikan *gender diversity* mampu memperkuat fungsi pengawasan internal dan membatasi perilaku oportunistik, khususnya dalam konteks pemanfaatan koneksi politik yang berpotensi menurunkan integritas laporan keuangan (Adams & Ferreira, 2009; Suhendra, 2020). Berdasarkan *stakeholder theory* dan *gender socialization theory*, *gender diversity* dalam komisaris independen diasumsikan mampu menjadi pemoderasi hubungan antara

koneksi politik dan integritas laporan keuangan. *Gender* membantu memastikan bahwa kepentingan seluruh *stakeholder* tetap diperhatikan melalui peningkatan kehati-hatian, kepatuhan, dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan perusahaan. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa *gender diversity* memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Pramaisella & Lestari, 2023; Suhendra, 2020). Dan dari penjelasan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitiannya adalah:

H₃: Gender Diversity Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Peran Moderasi Gender Diversity pada Hubungan Komisaris Independen dan Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), pemisahan antara fungsi kepemilikan (*principal*) dan pengelolaan perusahaan (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Manajer sebagai *agent* memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga membuka peluang terjadinya asimetri informasi dan perilaku oportunistik yang dapat menurunkan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Salah satu mekanisme tersebut adalah keberadaan komisaris independen, yaitu pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan meningkatkan integritas pelaporan keuangan (Wijaya, 2022; Sucitra *et al.*, 2020).

Efektivitas pengawasan komisaris independen tidak terlepas dari karakteristik individu yang terlibat di dalamnya, termasuk aspek *gender diversity*. Dalam perspektif *Gender Socialization Theory* (Eagly, 1987; Eagly & Wood, 2012), perempuan dan laki-laki disosialisasikan dalam nilai dan norma sosial yang berbeda, yang membentuk pola perilaku serta gaya pengambilan keputusan yang khas. Perempuan umumnya diasosiasikan dengan sifat kehati-hatian, ketelitian, kepatuhan terhadap aturan, dan sensitivitas etis yang lebih tinggi, sedangkan laki-laki cenderung lebih berorientasi pada keberanian mengambil risiko dan keputusan yang agresif. Perbedaan karakter ini menyebabkan keberadaan perempuan dalam jajaran komisaris independen mampu memperkaya sudut pandang pengawasan serta meningkatkan kualitas evaluasi terhadap kebijakan manajerial (Wijaya, 2022; Suhendra, 2020).

Dalam penelitian ini, *gender diversity* diposisikan sebagai variabel moderasi, bukan sebagai variabel independen langsung. Artinya, *gender diversity* tidak secara langsung menentukan tingkat integritas laporan keuangan, tetapi memengaruhi kekuatan hubungan antara komisaris independen dan integritas laporan keuangan. Ketika proporsi perempuan dalam komisaris independen meningkat, peran pengawasan menjadi lebih efektif karena adanya keseimbangan antara gaya pengambilan keputusan yang cenderung *risk-taking* (laki-laki) dan *risk-averse* (perempuan). Kondisi ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya struktur tata kelola yang mampu

menekan perilaku oportunistik *agent* melalui pengawasan yang lebih ketat dan berimbang (Suhendra, 2020).

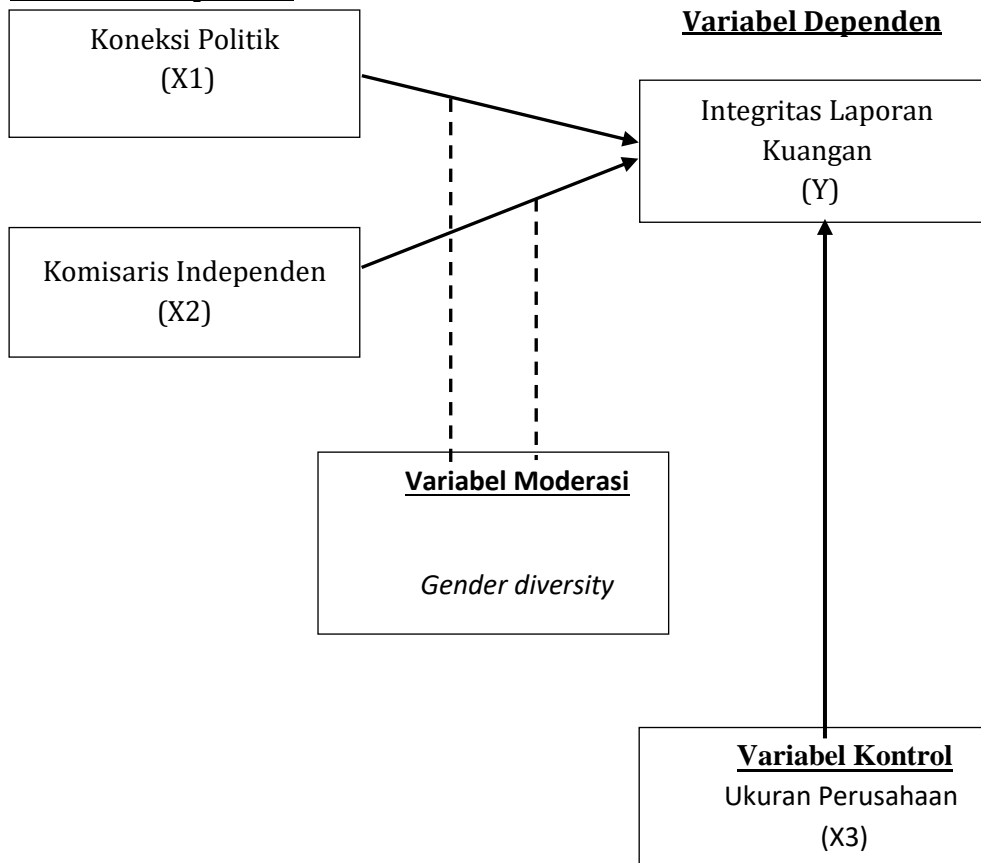
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan integritas laporan keuangan, dan pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika didukung oleh *gender diversity* dalam dewan. *Gender diversity* mendorong pertukaran perspektif, meningkatkan kualitas diskusi, serta memperkuat fungsi monitoring, sehingga mampu menekan potensi bias dan manipulasi informasi keuangan. Temuan penelitian terdahulu juga mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa *gender diversity* berkontribusi terhadap peningkatan integritas laporan keuangan (Pramaisella & Lestari, 2023; Suhendra, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Keberagaman gender memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.

Model Penelitian

Penelitian ini mengembangkan model yang menguji pengaruh koneksi politik dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Selain itu, *gender diversity* dimasukkan sebagai variabel moderasi untuk menjelaskan bagaimana karakteristik dewan memengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Model konseptual penelitian disajikan pada Gambar 1.

Variabel Independen



Gambar 1: Bagan Model Penelitian

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Penelitian ini memilih sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria salah satunya perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Berikut ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI per 13 April 2025.
2. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI sebelum 01 Januari 2021.
3. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang tidak melakukan *delisting* dan *relisting* pada periode 2021-2024.
4. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang melaporkan laporan tahunan selama periode 2021-2024.

Adapun perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang akan menjadi sampel penelitian berjumlah 78 perusahaan selama periode.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan mencerminkan penyajian informasi keuangan yang akurat, transparan, dan bebas manipulasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Integritas ini penting karena memengaruhi pengambilan keputusan dan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan (Vivian & Khairudin, 2024).

Penelitian ini mengukur konservatisme akuntansi dengan pendekatan akrual Givoly dan Hayn (2000), di mana konservatisme ditunjukkan melalui akrual negatif yang mencerminkan pengakuan beban lebih cepat dan pendapatan yang lebih berhati-hati. Konservatisme diukur dengan CONACC, yaitu selisih laba operasi dan arus kas operasi yang dibagi total aset lalu dikalikan -1. Semakin tinggi nilai CONACC, semakin tinggi tingkat konservatisme perusahaan (Efrilita & Taqwa, 2019).

Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan:

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{TA}}$$

Dimana

CONACC = konservatisme akuntansi

NIO = laba operasi tahun berjalan

DEP = penyusutan tahun berjalan

CFO = jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi tahun berjalan;

TA = total aset tahun berjalan

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan hubungan antara perusahaan dan pemerintah yang dapat memberikan keuntungan tertentu, namun juga berpotensi disalahgunakan dalam pelaporan keuangan (Setiadi & Dewi, 2023). Hubungan ini umumnya terjalin melalui pemegang saham mayoritas atau manajemen puncak yang memiliki relasi dengan pejabat atau politisi untuk memperoleh dukungan dan akses sumber daya (Yohanes & Merry, 2024). Dalam penelitian ini, koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 jika tidak.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, pemegang saham pengendali, maupun kepentingan bisnis yang dapat memengaruhi objektivitasnya (Dewi et al., 2022; Sucitra et al., 2020). Dalam penelitian ini, variabel ini diukur dengan rasio jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

$$\text{BOCIndep} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Gender Diversity

Gender diversity adalah keberagaman jenis kelamin dalam jajaran manajemen perusahaan, seperti direksi dan komisaris. Kehadiran perempuan dinilai dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga mendukung kebijakan yang lebih inklusif (Pramaisella & Lestari, 2023). Variabel gender diversity diukur dengan menggunakan variabel rasio, dimana:

$$\text{GD} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Wanita \& Direksi Wanita}}{\sum \text{Jumlah Dewan Komisaris \& Direksi}}$$

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang umumnya diukur melalui total aset atau penjualan. Perusahaan yang lebih besar cenderung mendapat perhatian publik lebih tinggi sehingga terdorong menyajikan laporan keuangan secara lebih transparan dan berintegritas (Nurbaiti et al., 2021). Ukuran perusahaan diukur dengan:

$$\text{Size Firm} = \text{LN}(\text{TotalAset})$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan tahapan pemilihan model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect

Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Selanjutnya, uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih tepat adalah Common Effect Model (CEM) atau Random Effect Model (REM). Setelah model terpilih, penelitian ini melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan validitas model. Uji normalitas bertujuan memastikan distribusi data, uji multikolinearitas menguji korelasi antarvariabel independen melalui nilai VIF, uji heteroskedastisitas menguji kesamaan varians residual, serta uji autokorelasi menguji hubungan antar residual dalam data time series, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara akurat dan reliabel.

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua adalah analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Di mana:

- Y = Integritas Laporan Keuangan
- X₁ = Koneksi Politik
- X₂ = Komisaris Independen
- α = Intercept (konstanta)
- β₁X₁ = Koefisien regresi untuk variabel bebas koneksi politik
- β₂X₂ = Koefisien regresi untuk variabel bebas komisaris Independen
- ε = Kesalahan acak

Berikut merupakan regresi antara variabel X dan Y:

$$CONACC_{it} = \alpha + \beta_1 POLCON_{it} + \beta_2 BOCIndep_{it} + \beta_3 LN_{it} + \epsilon_{it} \dots (1)$$

Dimana:

- CONACC_{it} = Integritas Laporan Keuangan i pada tahun t
- POLCON_{it} = Koneksi Politik i pada tahun t
- BOCIndep_{it} = Komisaris Independen i pada tahun t
- LN_{it} = Ukuran Perusahaan i pada tahun t

Berikut merupakan regresi variabel X dan Y yang dimoderasi oleh variabel Z:

$$CONACC_{it} = \alpha + \beta_1 POLCON_{it} + \beta_2 BOCIndep_{it} + \beta_3 POLCON_{it} GDit + \beta_4 BOCIndep_{it} GDit + \beta_5 LN_{it} + \epsilon_{it} \dots (2)$$

Dimana:

- CONACC_{it} = Integritas Laporan Keuangan i pada tahun t
- POLCON_{it} = Koneksi Politik i pada tahun t
- BOCIndep_{it} = Komisaris Independen i pada tahun t
- GD_{it} = Gender Diversity i pada tahun t
- LN_{it} = Ukuran Perusahaan i pada tahun t

Hasil dan Diskusi

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran karakteristik data melalui nilai Obs, mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum setiap variabel (Tabel 1). Selanjutnya, distribusi frekuensi digunakan untuk menunjukkan proporsi perusahaan yang memiliki dan tidak memiliki koneksi politik selama periode penelitian (Tabel 2).

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
CONACC	312	-.0981497	.6955491	-1	.6977126
koneksipol	312	.3333333	.4721618	0	1
BOCIndep	312	.4165945	.1216148	.1666667	.8333333
LN	312	28.6947	2.079054	17.98265	34.10059
GD	312	.1673403	.1546921	0	.75

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Tabel 2 Hasil Distribusi Frekuensi koneksi Politik

Koneksi Politik	TAHUN				Total
	2021	2022	2023	2024	
0	51	52	52	53	208
	24.52	25.00	25.00	25.48	100.00
1	27	26	26	25	104
	25.96	25.00	25.00	24.04	100.00
Total	78	78	78	78	312
	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan 312 observasi tanpa missing values sehingga data dinilai konsisten dan representatif. Variabel integritas laporan keuangan (CONACC) memiliki rata-rata $-0,0981$ dengan rentang -1 hingga $0,6977$, yang menunjukkan tingkat konservatisme relatif rendah dan bervariasi antarperusahaan. Variabel koneksi politik memiliki rata-rata $0,3333$, artinya sekitar 33% perusahaan memiliki koneksi politik, sedangkan sisanya tidak.

Proporsi komisaris independen (BOCIndep) memiliki rata-rata $0,4166$ atau sekitar 41,66%, dengan variasi yang cukup beragam. Ukuran perusahaan (LN) menunjukkan rata-rata $28,6947$ dengan rentang yang mencerminkan perbedaan skala perusahaan dari kecil hingga besar. Sementara itu, gender diversity memiliki rata-rata $0,1673$, yang mengindikasikan keterwakilan perempuan masih relatif rendah, meskipun terdapat variasi komposisi gender antarperusahaan.

Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan metode estimasi dalam regresi data panel dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Tahap awal dilakukan melalui uji

Chow untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji Chow disajikan pada Tabel 3 dan uji hausman pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Uji Chow
F (77,230) = 32.32
Prob > F = 0.0000

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan uji Chow, diperoleh nilai $F(77,230) = 32,32$ dengan $Prob > F$ sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antar unit cross-section, sehingga asumsi intersep yang sama pada Common Effect Model tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Fixed Effect Model (FEM) dipilih karena mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik individual yang relatif konstan, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan meminimalkan bias akibat heterogenitas yang tidak teramati.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman
$\chi^2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$ $= 5.32$
Prob > $\chi^2 = 0.2560$

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan uji Hausman, diperoleh nilai $Prob > \chi^2$ sebesar 0,2560 ($> 0,05$), sehingga H_0 tidak ditolak. Hasil ini menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), sehingga asumsi efek individual bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dapat diterima. Oleh karena itu, Random Effect Model (REM) dipilih karena lebih efisien dan memberikan estimasi yang optimal pada data panel penelitian ini.

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM) dalam regresi data panel. Uji ini mengidentifikasi keberadaan efek individual dalam data sehingga dapat menentukan model estimasi yang lebih tepat. Hasil uji Lagrange Multiplier disajikan pada Tabel 5

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

<i>Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier test for Random Effects</i>		
CONACC[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t]		
<i>Estimated results:</i>		
	Var	SD = sqrt (Var)
CONACC	.4837885	.6955491
e	.1530856	.3912615
u	.0947614	.3078334
Test: Var(u) = 0		
chibar2(01) = 53.15		
Prob > chibar2 = 0.0000		

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan uji Breusch–Pagan Lagrangian Multiplier (LM), diperoleh nilai $\chi^2(01) = 53,15$ dengan $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar $0,0000 (< 0,05)$, sehingga H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan adanya varians efek individual yang signifikan, sehingga Common Effect Model (CEM) tidak sesuai. Oleh karena itu, Random Effect Model (REM) dipilih karena mampu menangkap variasi antar unit cross-section dan menghasilkan estimasi yang lebih efisien pada data panel penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel. Pengujian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tahap awal dilakukan melalui uji normalitas untuk menilai apakah data terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Variable	<i>Skewness and kurtosis tests for normality</i>			
	Obs	Pr (kurtosis)	Pr (skewness)	Joint Test Adj chi2(2) Prob>chi2
res	312	0.5802	0.0409	4.51 0.1050

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan Skewness and Kurtosis Tests for Normality dengan 312 observasi, diperoleh $\text{Prob} > \text{kurtosis}$ sebesar $0,5802$ dan $\text{Prob} > \text{skewness}$ sebesar $0,0409$. Nilai skewness yang di bawah $0,05$ menunjukkan adanya sedikit ketidaksimetrisan, sedangkan kurtosis tidak bermasalah. Namun, pada Joint Test diperoleh $\text{Adj } \chi^2(2) = 4,51$ dengan $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar $0,1050 (> 0,05)$, sehingga H_0 tidak ditolak dan residual secara keseluruhan berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan.

Selanjutnya Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat memengaruhi kestabilan estimasi model regresi. Pengujian ini umumnya menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 7 dan 8 uji Variance inflation Factor.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	Uji Multikolinearitas			
	CONACC	koneksipolitik	BOCIndep	LN
CONACC	1.0000			
koneksipolitik	-0.2030	1.0000		
BOCIndep	-0.3254	-0.0354	1.0000	
LN	-0.6004	0.2796	-0.0143	1.0000

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen, karena seluruh nilai korelasi berada di bawah ambang batas $0,80$. Hal ini

mengindikasikan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 8. Hasil Variance Inflation Factor

<i>Variance Inflation Factor</i>		
<i>Variable</i>	VIF	1/VIF
Koneksi politik	1.09	0.920820
LN	1.08	0.921786
BOCIndep	1.00	0.998728
Mean VIF	1.06	

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Hasil uji korelasi berpasangan menunjukkan tidak adanya hubungan yang kuat antar variabel independen karena seluruh koefisien berada di bawah 0,80. Hal ini diperkuat oleh nilai VIF yang berkisar antara 1,00–1,09 dengan Mean VIF sebesar 1,06, jauh di bawah batas 5 atau 10. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas dan layak untuk analisis lebih lanjut.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Model yang baik mensyaratkan varians residual yang konstan (homoskedastisitas) agar estimasi tidak bias. Pengujian ini umumnya menggunakan uji Breusch-Pagan atau metode sejenis. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas
chi2(1) = 1.48
Prob > chi2 = 0.2230

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai Chi-square (χ^2) sebesar 1,48 dengan Prob > χ^2 sebesar 0,2230 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol tidak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model, sehingga varians residual dapat dianggap konstan. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis serta pengujian hipotesis lebih lanjut.

Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar residual pada periode yang berbeda dalam data panel. Autokorelasi dapat memengaruhi keakuratan standar error dan inferensi statistik, sehingga perlu diuji untuk memastikan validitas model regresi. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi
Obs = 312
N(runs) = 67
z = -10.21
Prob> z = 0

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan uji autokorelasi dengan 312 observasi dan 67 kelompok panel, diperoleh nilai z sebesar -10,21 dengan Prob > z sebesar 0,0000 (< 0,05), sehingga H_0 ditolak dan

terdapat autokorelasi dalam model. Hal ini menunjukkan adanya korelasi residual antarperiode yang dapat menyebabkan standar error menjadi bias dan estimasi kurang efisien. Oleh karena itu, digunakan robust standard error agar hasil estimasi tetap reliabel dan layak untuk pengujian hipotesis.

Hasil Uji Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, autokorelasi residual merupakan pelanggaran asumsi klasik yang cukup umum karena adanya ketergantungan antarperiode dalam satu unit analisis. Menurut Gujarati dan Porter (2009), autokorelasi tidak membuat koefisien regresi menjadi bias atau tidak konsisten, tetapi memengaruhi ketepatan standar error. Artinya, dampaknya lebih pada inferensi statistik, bukan pada nilai koefisien itu sendiri. Oleh karena itu, jika dilakukan koreksi pada standar error, hasil regresi tetap dapat digunakan secara ilmiah.

Greene (2018) dan Baltagi (2021) menyatakan bahwa autokorelasi pada data panel merupakan hal yang umum terjadi dan bukan alasan untuk menolak model, selama peneliti menggunakan metode estimasi yang tepat seperti robust standard errors atau GLS agar inferensi statistik tetap valid. Wooldridge (2010) menyatakan bahwa dalam data panel modern, uji autokorelasi tidak selalu wajib jika peneliti telah menggunakan cluster-robust atau HAC standard errors. Penggunaan standar error robust merupakan praktik umum untuk menjaga validitas inferensi meskipun asumsi klasik tidak terpenuhi, sehingga kegagalan uji autokorelasi tidak otomatis menggugurkan validitas penelitian selama telah dilakukan koreksi yang tepat.

Pandangan tersebut didukung oleh Stock dan Watson (2008) yang menunjukkan bahwa robust standard errors pada regresi data panel tetap menghasilkan inferensi yang konsisten meskipun terdapat autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hoechle (2007) dan Vogelsang (2012) juga menegaskan bahwa penggunaan robust, clustered, atau Driscoll-Kraay standard errors merupakan solusi metodologis yang sah, sehingga inferensi statistik tetap dapat diandalkan ketika struktur autokorelasi telah diakomodasi dengan estimasi kovarians yang robust.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, ketidaklulusan uji autokorelasi dalam penelitian ini tidak menghalangi kelanjutan analisis karena estimasi telah menggunakan robust standard errors. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah autokorelasi telah ditangani sesuai praktik ekonometrika yang diakui secara akademik. Oleh karena itu, hasil pengujian pengaruh koneksi politik dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan dengan gender diversity sebagai variabel moderasi tetap dapat diinterpretasikan secara valid dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Menggunakan *robust*

<i>Random-effects GLS regression</i>		<i>Number of obs</i> = 312				
<i>Group variable: ID</i>		<i>Number of groups</i> = 78				
<i>R-squared:</i>		<i>Obs per group:</i>				
<i>Within</i> = 0.0427		<i>min</i> = 4				
<i>Between</i> = 0.6643		<i>avg</i> = 4.0				
<i>Overall</i> = 0.4956		<i>max</i> = 4				
<i>Corr (u_i, X) = 0 (assumed)</i>		<i>Wald chi2(6)</i> = 116.08				
		<i>Prob > chi2</i> = 0.0000				
<i>(Std. err. adjusted for 78 clusters in ID)</i>						
CONACC	Coefficient	Robust Std.err	z	P>z	[95% conf. interval]	
ckoneksi	-.0762967	.0923042	-0.83	0.408	-.2572096	.1046162
cBOC	-1.881381	.2925933	-6.43	0.000	-2.454853	-1.307908
cGD	-.1733343	.30638	-0.57	0.572	-.773828	.4271595
ckoneksi_cGD	1.31964	.6406504	2.06	0.039	.0639886	2.575292
cBOC_cGD	5.011956	2.31436	2.17	0.030	.4758933	9.548019
LN	-.1688267	.0475351	-3.55	0.000	-.2619938	-.0756597
_cons	4.749388	1.376065	3.45	0.001	2.05235	7.446426
sigma_u	.30460963	<i>(fraction of variance due to u_i)</i>				
sigma_e	.38820484					
rho	.38107117					

Sumber: Data Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil estimasi regresi, model menunjukkan kinerja yang signifikan secara simultan dengan nilai Wald chi-square sebesar 116,08 dan probabilitas 0,000. Nilai R-squared overall sebesar 0,4956 mengindikasikan bahwa 49,56% variasi integritas laporan keuangan (CONACC) dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Nilai rho sebesar 0,381 menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antarperusahaan sehingga penggunaan random effects dinilai tepat. Secara parsial, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (koefisien $-0,0763$; p-value 0,408). Sebaliknya, komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan (koefisien $-1,8813$; p-value 0,000), yang mengindikasikan fungsi pengawasan belum berjalan optimal.

Peran moderasi gender diversity terlihat dari interaksi koneksi politik dan gender diversity yang berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,1320; p-value 0,039), menunjukkan bahwa keberagaman gender mampu memperkuat integritas laporan keuangan pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Interaksi antara komisaris independen dan gender diversity juga signifikan positif (koefisien 5,0120; p-value 0,030), yang berarti gender diversity meningkatkan efektivitas pengawasan dewan. Sementara itu, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif signifikan

(koefisien $-0,1688$; p-value $0,000$), menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki integritas laporan keuangan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, gender diversity terbukti berperan penting dalam memperkuat mekanisme tata kelola dan meningkatkan integritas pelaporan keuangan.

Diskusi

Pengaruh koneksi politik terhadap integritas laporan keuangan

Berdasarkan hasil estimasi regresi *random effects* dengan standar *error robust*, koefisien koneksi politik sebesar $-0,0762967$, dengan nilai p sebesar $0,408$ menunjukkan variabel koneksi politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan *stakeholder theory*, koneksi politik secara teoretis dipandang sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi integritas laporan keuangan. Hubungan politik yang dimiliki oleh manajemen atau dewan perusahaan dapat memberikan akses istimewa terhadap dukungan pemerintah, kelonggaran regulasi, serta perlindungan dari pengawasan eksternal. Dalam perspektif ini, koneksi politik berpotensi menurunkan integritas laporan keuangan apabila dimanfaatkan secara oportunistik untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Setiadi & Dewi, 2023).

Namun demikian, hasil penelitian tidak sejalan dengan *stakeholder theory*. Penelitian ini mengindikasikan bahwa secara empiris, keberadaan hubungan politik dalam struktur perusahaan tidak secara langsung menentukan kualitas, kejujuran, maupun tingkat kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak serta merta menunjukkan integritas laporan keuangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik (Susilawati & Murwaningsari, 2021; Setiadi & Dewi, 2023).

Hasil ini juga dapat dijelaskan dari karakteristik sampel penelitian. Berdasarkan distribusi frekuensi, perusahaan yang memiliki koneksi politik hanya berjumlah 104 observasi atau sekitar 33% dari total sampel, sedangkan sekitar 67% perusahaan dalam sampel tidak memiliki koneksi politik. Proporsi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa koneksi politik bukanlah karakteristik dominan pada perusahaan sektor yang diteliti. Dengan jumlah perusahaan berkoneksi politik yang terbatas, pengaruhnya terhadap variasi integritas laporan keuangan menjadi kurang kuat secara statistik, sehingga tidak mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model regresi.

Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi dalam *stakeholder theory*, yang dimana perusahaan akan menyesuaikan perilakunya untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* yang memiliki kekuatan dominan, termasuk aktor politik tidak sepenuhnya terkonfirmasi dalam konteks laporan keuangan. Tidak signifikannya pengaruh koneksi politik mengindikasikan bahwa kepentingan *stakeholder* politik tidak lebih dominan dibandingkan *stakeholder* non-politik dalam memengaruhi integritas laporan keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan tetap mempertimbangkan *stakeholder* yang lebih luas, terutama investor, kreditor, auditor, dan masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan (Freeman, 1984; Solihin, 2020).

Perusahaan publik juga berada di bawah pengawasan ketat dari regulator, auditor independen, serta mekanisme tata kelola perusahaan yang membatasi ruang gerak manajemen untuk memanfaatkan koneksi politik secara oportunistik. Risiko reputasi, sanksi hukum, serta potensi hilangnya kepercayaan investor menjadi faktor pembatas yang mendorong manajemen untuk tetap menyajikan laporan keuangan yang berintegritas, terlepas dari adanya hubungan politik (Deegan, 2004; Gray *et al.*, 1995).

Temuan ini menolak hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, serta sejalan dengan penelitian Setiadi & Dewi (2023), serta Susilawati & Murwaningsari (2021), bahwa integritas laporan keuangan lebih dipengaruhi oleh tekanan regulasi, mekanisme tata kelola, dan tuntutan *stakeholder* non-politik dibandingkan oleh keberadaan hubungan politik semata.

Pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan

Berdasarkan hasil estimasi regresi *random effects* dengan standar *error robust*, koefisien BOCIndep sebesar -1.881381, dengan nilai p sebesar 0.000, variabel komisaris independen terbukti berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan dan proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris memiliki keterkaitan secara statistik dengan tingkat integritas laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, komisaris independen tetap merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang relevan dalam memengaruhi integritas laporan keuangan.

Dalam perspektif *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), pemisahan antara *principal* dan *agent* menimbulkan potensi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham. Kondisi tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dirancang sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan dengan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta menjaga integritas laporan keuangan (Sucitra *et al.*, 2020; Wijaya, 2022).

Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan yang optimal. Koefisien negatif yang dihasilkan mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengawasan secara substantif. Efektivitas peran komisaris independen sangat bergantung pada tingkat keterlibatan, independensi substansial, serta kualitas pengawasan yang dijalankan. Komisaris independen yang hanya memenuhi ketentuan formal regulasi belum tentu mampu menjalankan fungsi monitoring secara efektif, terutama apabila keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis masih terbatas (Wijaya, 2022).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04.2014, perusahaan publik diwajibkan memiliki paling sedikit 30% komisaris independen dalam struktur dewan komisaris. Dalam penelitian ini, rata-rata proporsi komisaris independen pada

perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* telah melampaui ketentuan tersebut. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan regulasi secara kuantitatif belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pengawasan secara substantif, sehingga pengaruh negatif komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan mencerminkan kompleksitas peran dan dinamika internal dewan komisaris (Nurul Oktaviani *et al.*, 2021).

Selain itu, keberadaan komisaris independen dalam jumlah yang relatif besar juga berpotensi menimbulkan tantangan koordinasi serta perbedaan pandangan dalam proses pengawasan. Keberagaman latar belakang, pengalaman, dan perspektif komisaris independen dapat memengaruhi efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan dewan komisaris dalam menjaga integritas laporan keuangan (Fatin & Suzan, 2022). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, namun arah dan efektivitas pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh kualitas peran, kompetensi, dan keterlibatan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Sucitra *et al.*, 2020; Wijaya, 2022; Fatin & Suzan, 2022).

Pengaruh koneksi politik terhadap integritas laporan keuangan dengan dimoderasi oleh Gender Diversity

Berdasarkan hasil estimasi regresi *random effects* dengan *standar error robust*, koefisien 1.31964 dan nilai P sebesar 0.039, menunjukkan interaksi antara koneksi politik dan *gender diversity* bernilai positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap integritas laporan keuangan bersifat kondisional dan bergantung pada konteks tata kelola internal perusahaan. Dengan kata lain, koneksi politik tidak secara langsung memengaruhi integritas laporan keuangan, namun baru memiliki implikasi ketika berada dalam lingkungan pengambilan keputusan yang memiliki *gender diversity* (Suhendra, 2020).

Gender diversity tidak berperan dalam meningkatkan koneksi politik itu sendiri, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mengarahkan pemanfaatan koneksi politik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap integritas laporan keuangan. Kehadiran perempuan bersama laki-laki dalam struktur pengawasan dan pengambilan keputusan menciptakan keseimbangan perspektif serta memperkuat proses monitoring, sehingga potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul akibat koneksi politik dapat dikelola secara lebih efektif. Kondisi ini mendorong manajemen untuk bersikap lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan (Majidah & Muslih, 2019; Pramaisella & Lestari, 2023).

Penjelasan atas temuan ini sejalan dengan *gender socialization theory*, yang menyatakan bahwa perbedaan perilaku, nilai, dan sikap terhadap risiko antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosialisasi sosial yang berlangsung secara sistematis. Perempuan umumnya disosialisasikan untuk lebih berhati-hati, berorientasi pada etika, serta sensitif terhadap risiko reputasi dan dampak jangka panjang, sementara laki-laki cenderung lebih toleran terhadap risiko dan lebih berorientasi pada pencapaian hasil dan kinerja. Dalam konteks perusahaan yang memiliki koneksi politik, perbedaan karakter ini menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat dalam proses

pengambilan keputusan, sehingga kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi lebih konservatif dan berorientasi pada integritas laporan keuangan (Eagly, 1987; West & Zimmerman, 1987; Suhendra, 2020).

Selain itu, dari perspektif *stakeholder theory*, koneksi politik berpotensi mendorong perusahaan untuk lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, yang secara teoritis dapat mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Namun, *gender diversity* dalam struktur pengawasan memperluas representasi kepentingan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sudut pandang yang lebih beragam, kebijakan akuntansi yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politis, tetapi juga memperhatikan kepentingan investor, kreditor, dan masyarakat luas. Kondisi ini mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan konservatif (Freeman, 1984; Suhendra, 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak secara otomatis berdampak buruk terhadap integritas laporan keuangan, namun dapat menjadi berisiko apabila tidak diimbangi dengan tata kelola internal yang memadai. Keberadaan *gender diversity* memungkinkan perusahaan mengelola koneksi politik secara lebih bertanggung jawab, sehingga integritas laporan keuangan tetap terjaga meskipun perusahaan beroperasi dalam lingkungan dengan dinamika politik yang kompleks (Suhendra, 2020). Temuan ini sejalan dengan Majidah dan Muslih (2019), Pramaisella dan Lestari (2023), serta Suhendra (2020).

Pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan dengan dimoderasi oleh Gender Diversity

Berdasarkan hasil estimasi regresi *random effects* dengan standar *error robust*, koefisien interaksi antara komisaris independen dan *gender diversity* sebesar 5,011956 dengan nilai p sebesar 0,030. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel interaksi antara *gender diversity* dan komisaris independen berpengaruh secara statistik terhadap integritas laporan keuangan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan bersifat kondisional dan bergantung pada konteks tata kelola internal perusahaan. Dengan demikian, *gender diversity* berperan sebagai variabel moderasi yang meningkatkan kualitas peran komisaris independen dalam mendorong praktik pelaporan keuangan yang lebih hati-hati, transparan, dan berintegritas (Suhendra, 2020; Pramaisella & Lestari, 2023).

Secara empiris, efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh komisaris independen sangat ditentukan oleh dinamika pengambilan keputusan di dalam dewan. *Gender diversity* dalam jajaran komisaris independen menciptakan ruang diskusi yang lebih kritis dan inklusif, memperkaya sudut pandang, serta meningkatkan intensitas evaluasi terhadap kebijakan manajemen. Kondisi ini membuat fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga lebih substantif dalam mengarahkan manajemen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan (Adams & Ferreira, 2009; Majidah & Muslih, 2019).

Penjelasan tersebut sejalan dengan *gender socialization theory*, yang menyatakan bahwa perbedaan nilai, sikap, dan toleransi risiko antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosialisasi sosial. Perempuan umumnya disosialisasikan untuk lebih berhati-hati, berorientasi pada etika, serta sensitif terhadap risiko reputasi dan konsekuensi jangka panjang, sedangkan laki-laki cenderung lebih toleran terhadap risiko dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Kombinasi karakteristik ini menciptakan mekanisme *checks and balances* yang meningkatkan kualitas pengawasan dan mendorong pengambilan keputusan akuntansi yang lebih konservatif dan berorientasi pada integritas laporan keuangan (Eagly, 1987; West & Zimmerman, 1987; Suhendra, 2020).

Selanjutnya, dari perspektif *agency theory*, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen. *Gender diversity* dalam struktur komisaris independen memperkuat fungsi monitoring tersebut melalui peningkatan objektivitas, kehati-hatian, dan kualitas pengambilan keputusan, sehingga peran komisaris independen dalam menjaga integritas laporan keuangan menjadi lebih efektif (Jensen & Meckling, 1976; Adams & Ferreira, 2009).

Kehadiran perempuan dalam struktur komisaris independen memberikan nilai tambah dibandingkan komposisi yang didominasi laki-laki. Perempuan umumnya lebih berhati-hati, lebih peka terhadap risiko jangka panjang, serta lebih mempertimbangkan aspek etika dan reputasi perusahaan. Sebaliknya, laki-laki cenderung lebih toleran terhadap risiko dan berorientasi pada pencapaian kinerja sehingga berpotensi lebih menerima kebijakan akuntansi yang agresif. Kombinasi karakteristik tersebut menciptakan pengawasan yang lebih seimbang dan objektif, khususnya dalam mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, *gender diversity* membuat fungsi pengawasan komisaris independen tidak hanya independen secara formal, tetapi juga lebih efektif dalam menekan perilaku oportunistik manajemen. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan dengan *gender diversity* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, temuan penelitian mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat kondisional, di mana *gender diversity* berperan sebagai variabel moderasi. Secara khusus, koneksi politik tidak secara langsung memengaruhi integritas laporan keuangan, namun pengaruhnya menjadi signifikan ketika perusahaan memiliki keberagaman gender dalam struktur pengawasan. Demikian pula, pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan terbukti semakin kuat ketika didukung oleh *gender diversity* dalam dewan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan pada objek penelitian yang hanya mencakup satu sektor industri sehingga generalisasi hasil masih

terbatas, penggunaan variabel yang belum mencerminkan seluruh aspek tata kelola perusahaan, serta periode penelitian yang relatif singkat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor, menambahkan variabel tata kelola lain seperti kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit, serta menggunakan periode observasi yang lebih panjang agar mampu menangkap dinamika integritas laporan keuangan secara lebih komprehensif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur tata kelola perusahaan dengan memberikan bukti empiris mengenai peran komisaris independen dan gender diversity dalam meningkatkan integritas laporan keuangan, serta memperkaya pemahaman tentang hubungan koneksi politik dalam perspektif teori keagenan dan teori pemangku kepentingan. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa perusahaan perlu memperkuat struktur tata kelola melalui peningkatan independensi dewan dan keberagaman gender untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendorong efektivitas pengawasan dan kualitas pelaporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan studi lanjutan yang lebih luas dan mendalam terkait determinan integritas laporan keuangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan, dosen, dan seluruh staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau atas dukungan akademik, fasilitas, serta pelayanan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga, rekan, dan sahabat atas doa, dukungan moral, serta motivasi yang terus diberikan hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada diri sendiri atas komitmen, ketekunan, dan kesungguhan dalam menjalani setiap proses hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh ukuran dewan komisaris, gender diversity pada dewan, dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.3809>
- Ananda, C. R. (2020). Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(3), 8–14. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i3.99>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services* (16th ed.). Pearson Education Limited.

- Badewin. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The Review of Economic Studies*, 47(1), 239–253. <https://doi.org/10.2307/2297111>
- Christian, F., Upa, V. A., Mannan, A., & Indrijawati, A. (2023). Mampukah profitabilitas dan fee audit mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 1–8.
- Damayanti, D. N., Suhendar, D., & Martika, L. D. (2023). Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kualitas audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 9(1), 182–195. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.8261>
- Dewi, A. S., Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2022). Pengaruh komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. *E-Proceeding of Management*, 4(1), 99–105.
- Fatin, A. N., & Suzan, L. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 733–741. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2110>
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486–489. <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271. <https://doi.org/10.2307/1913827>
- Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *The Stata Journal*, 7(3), 281–312. <https://doi.org/10.1177/1536867X0700700301>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (4th ed.).
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Lilis, K., & Lastanti, H. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 38–59. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1463>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2008). Heteroskedasticity-robust standard errors for fixed effects panel data regression. *Econometrica*, 76(1), 155–174. <https://doi.org/10.1111/j.0012-9682.2008.00821.x>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.